

PEMETAAN PROTRET KEMERDEKAAN PERS DI SUMATERA SELATAN

Harry Yogsunandar
Universitas Sumatera Selatan

Abstract : *The press has an important role as the guardian of democracy in a democratic country. In reality there are many elements of interests that have castrated the independence of the press. This chaos is based on interest tensions that have an impact on the regulation and governance of the mass media as the umbrella of the press. The biggest challenge of the press today is freedom of the press from all aspects of interest. The theoretical footing to explore this problem is Peter K. Pringle. et.all, who said that there are four factors that influence mass media content, namely: The Audiencece, The Broadcaster, The Advertiser, The Regulator. Descriptive Qualitative Approach will be used in this study with the method of collecting interview data with stakeholders and press shareholders in South Sumatra and documentation (literary).*

Keywords: *Press Independence,, The Audience, The Broadcaster,The Advertiser, The Regulator.*

Abstrak : *Pers memiliki peran penting sebagai pengawal demokrasi pada sebuah negara demokrasi. Pada realitasnya ada banyak unsur kepentingan yang mengkebiri independensi pers. Kesemrawutan ini didasari dari tarik-menarik kepentingan yang berimbas pada regulasi dan tatakelola media massa sebagai payung pers.Tantangan terbesar pers saat ini adalah kemerdekaan pers dari segala aspek kepentingan. Pijakan teoritis untuk mendalami masalah ini adalah Peter K. Pringle. et.all,yang mengatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi konten media massa yaitu : The Audiencece, The Broadcaster,The Advertiser, The Regulator. Pendekatan Kualitatif Deskriptif akan digunakan pada penelitian ini dengan metode pengambailan data interview melibatkan stakeholder dan shareholder pers di Sumatera Selatan dan dokumentasi (literatur).*

Kata kunci: *Kemerdekaan Pers, The Audiencece, The Broadcaster,The Advertiser, The Regulator.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pers lokal (daerah) tidak akan pernah lepas dari dinamika pers secara umum (nasional). Dikarenakan peraturan dan hal-hal menyangkut pers secara umum terintegrasi secara nasional bahkan internasional (baca :*code of conduct journalism*). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 23 September 1999, perwujudan pers Indonesia makin dinamis (baca merdeka). Setiap media pers bebas menyiarkan informasi sesuai dengan moto dan nilai-nilai yang dianut.

Pers akhirnya akan berlomba-lomba mencari, memilah, menyunting dan merekonstruksi ulang fakta yang tersembunyi dan menyampaikannya kepada publik. Antar lembaga pers akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi penyampai berita pertama dengan kata lain pers berusaha bergerak lebih cepat untuk menyampaikan informasi-informasi penting.

Pers lebih bebas, leluasa, tumbuh berkembang dan lainnya. Jika ini digunakan sebagai indikator kebebasan maka pers saat dapat dikatakan lebih merdeka. Tema pers

ditambah lagi embel-embel tentang kemerdekaan pers adalah kajian diskusi yang tidak akan ada habisnya baik untuk kalangan praktisi, akademisi dan masyarakat. Peran pers yang sangat “sexy” dengan segala konsekuensinya masih mempunyai daya tarik tersendiri.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memetakan kemerdekaan atau kebebasan pers, penekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data interview dengan stakeholder dan shareholder di Sumatera Selatan dan dokumentasi (literatur). Pengambilan data ini dilakukan secara maraton dalam kurun waktu satu minggu. secara umum akan dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu :

2.1. Pers

Unsur-unsur utama dalam Pemilik Modal, Profesi Jurnalis dan Iklan. Sebagai sebuah salah satu industri media massa, Pers memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Industri media memperkerjakan ribuan orang secara langsung maupun tidak langsung dan juga berhubungan dengan industri-industri lainnya. Semisal industri *pulp and papper* (kertas), telekomunikasi, teknologi dan lainnya. Secara nasional pada tahun 2014 belanja iklan media menurut Harris Thajeb, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Rp. 150 triliun dengan pembagian 66% media televisi, 30% media cetak dan 4% media radio dan digital (dikutip dari varia.id). Artinya perolehan iklan televisi mencapai Rp.99 triliun, media cetak Rp. 45 triliun dan media radio + online sebesar Rp. 6 triliun. Jika kita mengambil contoh belanja iklan

cetak sampai sebesar Rp. 45 triliun, sebenarnya apa yang membuat industri pers cetak ini punya kekuatan ekonomi ?

Teks yang berbentuk bahasa, tanda/symbol, gambar, suara dan video kemudian ditranformasikan menjadi sebuah tulisan atau tayangan adalah produk dari media massa. Produk ini akan dipilah menjadi dua klasifikasi yaitu produk yang bersifat hiburan dan produk yang bersifat berita (jurnalis). Media massa cetak mempunyai kareteristik tersendiri dari media eletronik. Media massa cetak hampir 90% dari kontennya adalah bersifat informasi (berita) sedangkan media eletronik (televisi) total dari seluruh tayangan yang bersifat informasi (berita) kurang dari 30%. Hal khusus jika *core business* lembaga penyiaran televisi ini adalah berita (*stasiun format*) maka 100% produksinya adalah berita. Tidak mengherankan jika para pekerja di dunia Pers cetak mayoritas adalah insan-insan pers (jurnalis) kecuali yang dibidang administrasi. Konten Informasi yang disajikan oleh para jurnalis tentunya informasi yang mempunyai nilai berita (*news value*) tinggi. Ini adalah awal dari sumber permasalahan pada dunia pers. Semakin tinggi *news value* maka produk ini juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tidak mengherankan bilamana nilai ekonomi tinggi otomatis akan menjadi rebutan para pemilik kepentingan ekonomi. Unsur-unsur dari kekuatan ekonomi media ini adalah Diantaranya adalah :

Pemilik Modal

Sama seperti mendidrikan bentuk-bentuk usaha komersil, hal yang paling mendasar adalah modal usaha (materi dan non materi). Saat ini lembaga Pers menjelma menjadi atau setidaknya

mengarah sebuah pada industri. Biaya operasional yang besar ditambah tuntutan hal-hal lainnya, membuat manajemen media massa harus mencari peluang-peluang untuk menaikkan pemasukan. Tentunya pemasukan yang paling utama adalah melalui iklan (advertising). Sedangkan iklan akan masuk jika produk Pers (baca berita) mempunyai pembaca yang tinggi dan jangkauan distribusi yang luas. Secara tidak langsung para jurnalis inilah yang menjadi garda depan dalam industri ini.

Hubungan dengan kemerdekaan pers adalah :

1. Apakah para jurnalis ini sudah merdeka secara pribadi, menyangkut kesejahteraan, asuransi, jaminan hari tua, bonus dan sebagainya?
2. Apakah pada praktek jurnalistiknya para jurnalis ini bebas (merdeka) tanpa tekanan dari pemilik media yang telah melakukan kerjasama dengan para pengiklan?
3. Apakah kontrak kerja antara para jurnalis dan manajemen perusahaan pers (baca pemilik modal) sudah menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban?
4. Apakah manajemen perusahaan pers akan memberikan perlindungan penuh kepada para jurnalisnya?

- Ketua Dewan Pers Nasional Bagir Manan pada acara Audiensi Bupati Muara Enim bersama Ketua Dewan Pers Nasional dan Insan Media Pers Sumsel mengatakan bahwa Perusahaan Pers wajib sejahterakan karyawannya (palembang.tribunnews.com/2015/03/10/perusahaan...)

- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 10

Iklan

Iklan merupakan sumberdana utama dalam Media Massa baik cetak maupun elektronik yang dimiliki oleh pihak swasta. Sumber-sumber iklan ini dibagi menjadi dua yaitu iklan oleh pihak swasta yang mempunyai kepentingan ekonomi (*selling up* produk). Dan iklan oleh pemerintah yaitu mayoritas bersifat sosialisasi program pemerintah atau instansi pemerintah.

Secara khusus iklan berfungsi menanamkan *brand* produk kepada masyarakat. Tidak ada hubungan antara konten berita yang dibuat para jurnalis dan pengiklan. Dasar para pengiklan memilih media massa cetak untuk mengiklankan produknya adalah semata-mata karena oplah media massa yang banyak dan jangkauan yang luas.

Hubungan dengan kebebasan pers adalah jika para pengiklan ini menjadi salah satu objek berita dan kebetulan mempunyai news value yang tinggi. Apakah para jurnalis ini bebas mempraktekkan profesi jurnalisnya ?Catatan : Pokok bahasan lainnya dalam Kebebasan Pers dari perspektif Kekuatan Ekonomi diantaranya konglomerasi media, komersialisasi (komodifikasi) media dan ekonomi politik media.

2.2. Pemerintah

Unsur-unsur utamanya adalah regulasi, kekuatan politik (penguasa dan parpol)

Regulasi

“a kind of programme of governance, that enables federal bodies to intervene intentionally and with the aim of achieving specific effects, in the workings of the social sub-system with the help of the medium of control law. In this way, regulation becomes closely linked to the state - and to the medium law – to which only the state has access. Only individuals and organisations commissioned by the state have the mandate and the power to formulate regulations that are legally binding and have the force of law.”, (2002).

Jika mengacu pada pengertian tentang regulasi diatas jelas bahwa produk pemerintah berupa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan pers. Saat ini pers mengalami tumbuh keembang yang pesat. Jika meningkatnya jumlah lembaga pers (cetak & elektronik) dijadikan indikator, jelas bahwa pers mengalami kebebasan atau kemerdekaan. Hal ini terlihat pada maraknya bermunculan lembaga-lembaga pers. Saat ini regulasi pembuatan dan kepemilikan lembaga pers saat lebih mudah dan cepat. Sampai tahun 2014 tercatat 32 lembaga Pers (data Dewan Pers Nasional dikutip dari wikipedia.org) yang ada di Sumsel terdiri 5 lembaga penyiaran televisi, 14 surat kabar harian, 6 surat kabar/ tabloid mingguan, 7 website berita.

Kekuatan Politik

Media massa masih menjadi sebuah kekuatan utama dalam hal menyampaikan pesan. Media ini menjadi medium untuk komunikator dalam melakukan komunikasi. Tujuannya untuk

memutus jarak, ruang dan waktu agar pesan yang disampaikan menjangkau masyarakat secara luas. Pesan yang diterima oleh masyarakat, dengan menggunakan media massa menjadikan media tersebut sebagai sumber kekuatan (alat kontrol) dalam memetakan realitas sosial yang ada. Media massa juga berperan sebagai penengah antara masyarakat dan penguasa. Penguasa dapat memanfaatkan media untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan baik yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan begitupun sebaliknya. Karena memiliki banyak kepentingan tidak mengherankan bahwa kekuatan politik nantinya akan melakukan tekanan-tekanan baik pada pengajuan, pembuatan, sampai pada persetujuan sebuah regulasi. Kekuatan politik juga akan selalu membayangi para jurnalis ketika mereka melakukan pekerjaannya.

2.3. Masyarakat

Sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, Pers akan dielu-elukan/ dirindukan oleh masyarakat pada sisi lainnya pers bahkan pernah dihujat habis-habisan. Masyarakat dengan kemajemukannya adalah struktur yang kompleks dan saling melengkapi satu dan lainnya. Terdapat kalangan akademisi, alim ulama, buadayawan, kelompok mayoritas, kelompok minoritas atau SARA. Media massa jelas tidak mungkin dapat mengakomodir semua kepentingan dari masyarakat. Sama dengan contoh diatas jika salah satu objek pemberitaan adalah meyangkut salah satu kelompok dalam masyarakat. Adakah jaminan insan-insan pers ini dapat menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan penuh rasa aman?

3. HASIL

Pemecah Kebuntuan

1. Pers

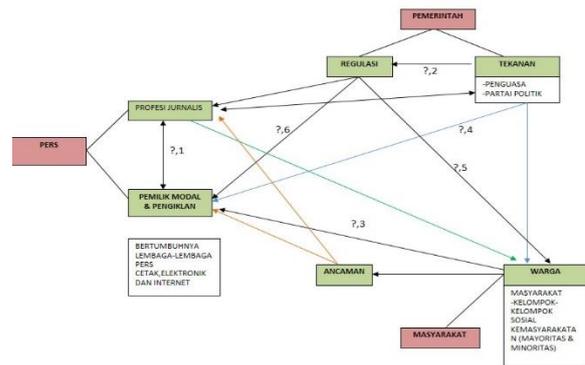
- a. Peningkatan Kesejahteraan Profesi Jurnalis
- b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- c. Perlindungan terhadap Jurnalis
- d. Pelatihan-pelatihan tentang profesi jurnalis
- e. Ikut bertanggung jawab dalam mendukung masyarakat

2. Pemerintah

- a. Membuat regulasi yang memastikan pers mampu berkembang secara dinamis dan sehat
- b. Memberlakukan sanksi tegas ketika pers sebagai lembaga atau kepada para jurnalis melanggar ketentuan regulasi atau menindahkan kode etik jurnalistik
- c. Memberikan edukasi kepada aparaturnya terkait tentang fungsi pers sebagai pilar demokrasi, agen pembangunan, kontrol sosial, dan lainnya.
- d. Bekerjasama dengan pendidikan tinggi, praktisi (profesional) dan tokoh masyarakat untuk memetakan bagaimana pers di Indonesia dan sosialisasi literasi media

- e. Bekerjasama dengan pendidikan tinggi, praktisi (profesional) dan tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan standar kompetensi jurnalis di Indonesia.

Berikut mapping kemerdekaan pers:



4. SIMPULAN

Sebagai salah satu penyanggah pilar demokrasi Pers harus memiliki profesionalitas dan tanggung jawab yang lebih. Pers berhubungan dengan khalayak, pers adalah sebuah keserentakan, pers dapat memutus ruang, waktu dan jarak. Kemerdekaan pers merupakan sebuah cita-cita yang memang tidak mudah untuk diraih tetapi tetap harus diperjuangkan. Konsekuensi-konsekuensi dari profesi jurnalistik seperti intimidasi, kekerasan fisik, pengkebirian hak-hak pekerja jurnalis adalah sebagai kawahcandradimuka ajang penempahan diri secara langsung untuk menjadi seorang jurnalis yang mempunyai prinsip mengabdikan bagi kepentingan khalayak dan kebenaran (kode etik jurnalistik).

Oplah, rating, follower salah tujuan yang harus dicapai tetapi bukan segalanya. Ada lagi tugas pers yang mungkin terlupakan adalah mencerdaskan khalayak dan tanggung jawab sosial. Mari kita bangun negeri ini dengan pers yang bertanggung jawab dan profesional. Dengan tidak mengurangi fakta dan aktualitas nilai berita, setidaknya informasi yang disampaikan dapat mencerdaskan, membuka wacana baru dan tentunya menyejukan. Salam buat insan-insan pers di SUMSEL.

DAFTAR RUJUKAN

Pringle, Peter K. (et.al), *Electronic Media Management*, Focal Press, Boston London, 2000.

Jarren, Otfried; Weber, Rolf; Donges, Patrick; Dörr, Bianka; Künzler, Mathias; Puppis Manuel, 2002.

Rundfunkregulierung.

Leitbilder, Modelle und Erfahrungen im internationalen Vergleich. Eine sozial- und rechtswissenschaftliche

Analyse. Zürich: Seismo Verlag. p.16.)